

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.14.12.25.97 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Pusakom Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Pusakom Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Pusakom Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
a. acuan bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS
KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.14.12.25.97 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT ANALISIS
KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran penting dan posisi strategis bagi Kementerian dan Lembaga (K/L), seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai salah satu satuan kerja dibawah lembaga pemerintah non kementerian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis sebagai turunan dari Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029. Dalam menyusun dokumen rencana strategis ini, kami berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

BPOM berkontribusi dalam memastikan peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk memastikan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, berkualitas, dan bermutu. Salah satu upaya meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah dengan meningkatkan kualitas kebijakan. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) yaitu melaksanakan analisis kebijakan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan dan evaluasi kebijakan guna mendukung kinerja BPOM dalam menjamin sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam kemitraan yang sinergi dalam pelaksanaan analisis kebijakan Obat dan Makanan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia dan daya saing produk lokal.

Semoga penyusunan Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 bermanfaat bagi bangsa dan negara.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Penyusunan dokumen rencana strategis Pusakom menggunakan landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian dalam menyusun substansi dan arah perencanaan pembangunan lima tahun yang akan datang, Pusakom mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh lembaga pemerintah non kementerian Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian kedudukan dan tugas fungsi Pusakom diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam menjalankan proses bisnis analisis kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berpedoman pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 90 Tahun 2023 tentang Sistem Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusakom merupakan unsur pendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki tugas “melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusakom mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain keenam fungsi di atas Pusakom juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dipimpin oleh Kepala Pusat dan membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

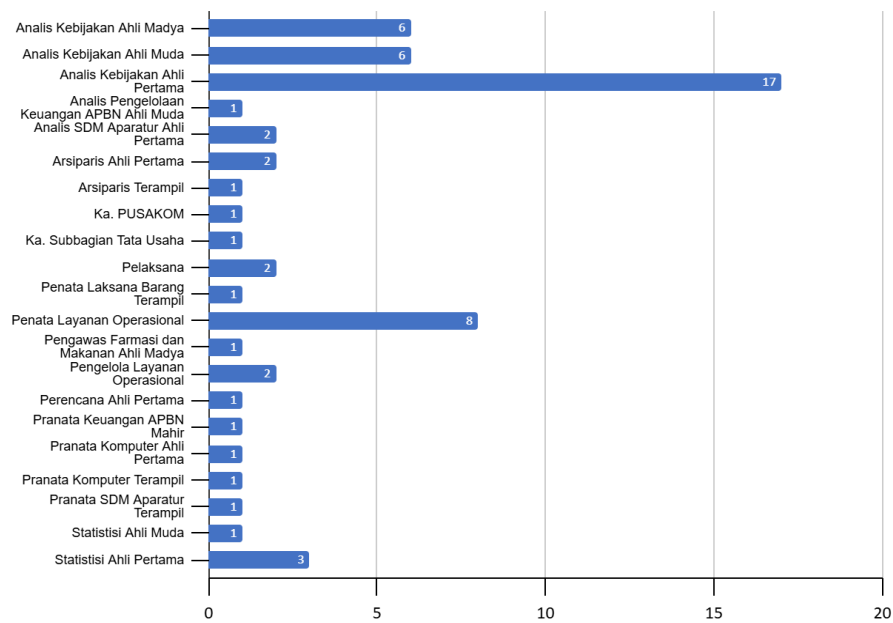


Gambar 1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusakom membagi kelompok jabatan fungsional menjadi dua fungsi besar yaitu fungsi Analisis Kebijakan yang fokus melaksanakan kegiatan analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

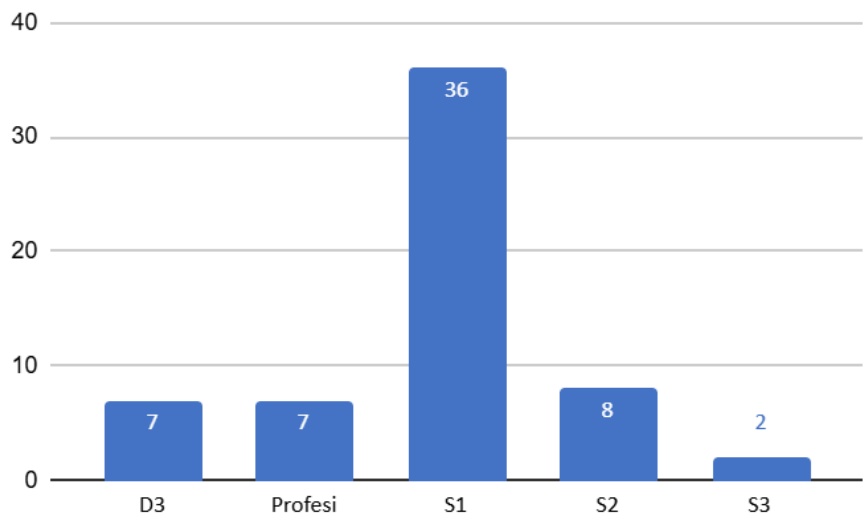
Fungsi Dukungan Strategis Pimpinan yang spesifik melaksanakan kegiatan terkait penyiapan bahan pimpinan, pendampingan pimpinan, dan monitoring arahan pimpinan. Dalam melaksanakan urusan administrasi nonteknis, Subbagian Tata Usaha memegang peran yang cukup vital dalam menyediakan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, aset, arsip, perencanaan dan evaluasi kinerja, sumber daya manusia, dan dukungan teknologi informasi. Seluruh tim ini dikoordinasi langsung oleh Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan data pegawai per Oktober 2025, terdapat 60 ASN (PNS dan PPPK). Berikut data sebaran pegawai Pusakom berdasarkan jabatan.



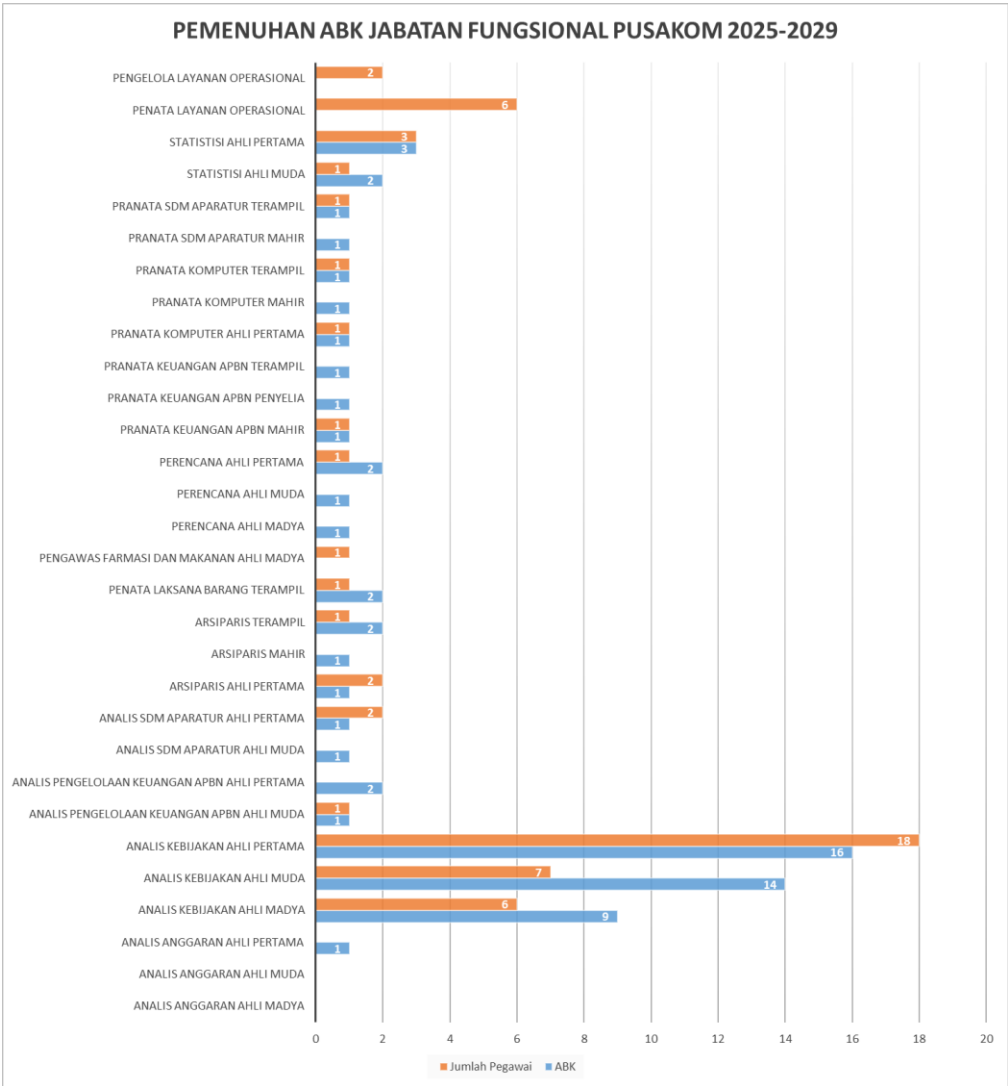
Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Selain itu Pusakom juga memiliki pegawai dari berbagai tingkat pendidikan untuk melaksanakan fungsi teknis dan administrasi sebagai sebuah satuan kerja mandiri. Berikut adalah profil pegawai Pusakom berdasarkan tingkat pendidikan.



Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dengan dukungan sumber daya manusia yang ada di Pusakom, masih terdapat kesenjangan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis kebijakan guna menyediakan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh Indonesia. Dengan sumber daya tersebut, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan BPOM. Berdasarkan data di atas Pusakom masih memiliki kesenjangan pemenuhan kebutuhan SDM yang telah dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Berikut kesenjangan kebutuhan personil dan jenis jabatan di Pusakom.

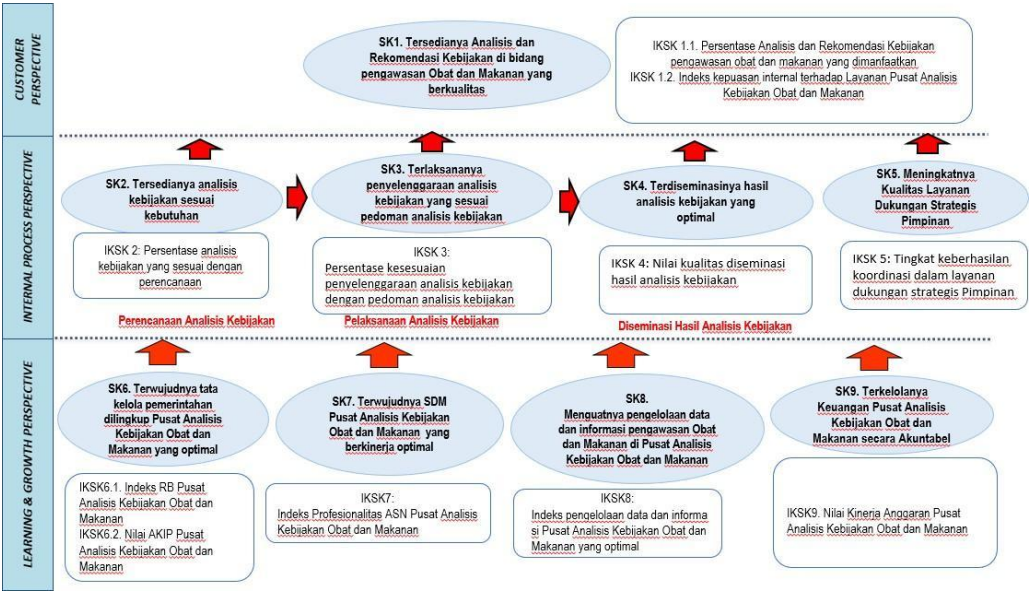


Gambar 4. Pemenuhan ABK Jabatan Fungsional

Berdasarkan data di atas Pusakom masih memerlukan tambahan personil. Terutama pada fungsi teknis analisis kebijakan dan dukungan strategis pimpinan. Jabatan yang melaksanakan peran ini antara lain Analis Kebijakan dan Statistisi. Pada jabatan Analis Kebijakan untuk jenjang Ahli Pertama hingga Ahli Madya masih memerlukan tambahan sebanyak 11 orang. Pada jabatan Statistisi untuk jenjang Ahli Pertama sudah terpenuhi dan Ahli Muda masih memerlukan tambahan 1 orang. Sedangkan dari fungsi administrasi masih memerlukan tambahan jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Perencana Ahli Pertama sampai Ahli Madya sebanyak 3 orang secara total dan Arsiparis Terampil sebanyak 1 orang serta Pengelola APBN baik analis maupun pranata sebanyak 3 orang.

I.1.1. Capaian Kinerja Renstra Pusakom Tahun 2020-2024

Pada periode perencanaan jangka menengah tahun 2020-2024 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menggunakan metode *balance scorecard* dalam menyusun penjenjangan kinerja dari level satuan kerja hingga level individu. Dalam *balanced scorecard* ini terdapat tiga tingkatan perspektif yaitu *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning & growth perspective*. Berikut kerangka *balance scorecard* dalam perencanaan jangka menengah periode tahun 2020-2024.



Gambar 5. *Balanced Scorecard* periode Renstra 2020-2024

Capaian kinerja jangka menengah yang dievaluasi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Pusakom Tahun 2025-2029 juga akan disajikan berdasarkan pencapaian berbagai indikator kinerja pada seluruh perspektif strategis dari *balanced scorecard* di atas.

Tabel 1. Matriks Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas															
IK 1.1: Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	72	72,60	100,83	75	78,66	104,88	78	78,86	101,10	80	83,97	104,96	84,5	86,80	102,73
IK 1.2: Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	3,30	-	-	3,60	-	-	3,62	-	3,63	3,65	100,55	3,66	3,62	98,88
Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Analisis Kebijakan sesuai Kebutuhan															
IK 2.1: Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan															
IK 3.1: Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman	80	91,05	113,81	84	91,75	109,23	94	94,38	100,40	96	97,20	101,25	98	98,19	100,20

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
analisis kebijakan															
Sasaran Kegiatan 4: Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal															
IK 4.1: Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	70	75,93	108,47	75	70,37	93,83	80	80	100	77	78,03	101,34	78,8	84,85	107,68
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan															
IK 5.1: Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	75	85,37	113,83	83,1	84,41	101,85	83,5	90,02	107,81	84	87,96	104,71	89	90,67	101,87
Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal															
IK 6.1: Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	81	77,92	96,20	81,7	81,74	100,05	85,2	87,17	102,31	88,7	87,55	98,70	92,2	86,29	93,59
IK 6.2: Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	80	75,06	93,81	76,6	75,1	98,04	78,1	80,475	103,04	79,6	80,61	101,27	82,76	81,58	98,57
Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal															
IK 7.1: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis	75	86,57	115,43	86,5	87	100,58	86,7	86,59	99,87	86,9	92,88	106,88	92,45	87,27	94,40

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Kebijakan Obat dan Makanan															
Sasaran Kegiatan 8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan															
IK 8.1: Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	1,51	0,75	49,67	2	2,5	125,0	2,25	2,5	111,1	2,5	3	120	3	3	100
Sasaran Kegiatan 9: Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel															
IK 9.1: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	93,0	90,6	97,42	90,7	88,95	98,08	91,3	88,19	96,59	92,5	89,03	96,25	89,65	97,97	109,28

Keterangan:

IK : Indikator Kinerja Kegiatan

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian

Pusakom mempunyai 9 sasaran kegiatan dan 11 indikator kinerja yang telah selesai diukur pada akhir periode Rencana Strategis 2020-2024. Indikator kinerja yang telah tercapai sebanyak 7 indikator dan 4 indikator kinerja tidak tercapai yaitu indeks kepuasan internal terhadap layanan Pusakom, indeks RB Pusakom, nilai AKIP Pusakom, dan indeks profesionalitas ASN Pusakom. Berikut disajikan capaian indikator kinerja analisis kegiatan yang mendukung capaian serta kesimpulan pencapaian masing-masing indikator kinerja dari *customer perspective* hingga *learning & growth perspective* sebagai berikut:

A. Sasaran Kegiatan 1 (Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas)

1. Indikator Kinerja 1.1 (Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan)

Perbandingan capaian ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator ini dari tahun 2020-2022. Berikut perbandingan capaian tahun 2020-2024.

Tabel 2. Perbandingan Capaian IK 1.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	72	72,60	100,83	Sangat Baik
Tahun 2021	75	78,66	104,88	Sangat Baik
Tahun 2022	78	78,86	101,10	Sangat Baik
Tahun 2023	80	83,97	104,96	Sangat Baik
Tahun 2024	84,5	86,80	102,73	Sangat Baik

Dilihat dari sisi realisasi dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 5,11% dari tahun 2022. Tren realisasi indikator ini selalu meningkat dari tahun 2020. Dari sisi capaian, capaian tahun 2023 ini merupakan persentase capaian tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan pencapaian indikator ini selama 4 tahun terakhir. Tren ini harus terus dipertahankan supaya capaian ini dapat meningkat di akhir periode Renstra 2020-2024. Upaya yang perlu dilakukan untuk perencanaan selanjutnya dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator ini antara lain sebagai berikut.

- a. Melibatkan pakar ahli terkait dengan analisis kebijakan untuk memastikan rekomendasi kebijakan lebih kredibel dan valid untuk dimanfaatkan.
 - b. Melakukan identifikasi kebutuhan topik analisis kebijakan sehingga calon pemanfaat menjadi lebih jelas dan hal ini dapat memastikan bahwa di akhir pelaksanaannya, rekomendasi kebijakan tersebut pasti dimanfaatkan oleh unit kerja yang membutuhkannya.
 - c. Meningkatkan aktivitas diseminasi hasil analisis kebijakan melalui publikasi, seminar, forum internal kepada calon pemanfaat hasil analisis kebijakan.
2. Indikator Kinerja 1.2 (Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusakom)

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditambahkan dalam peta

strategis Pusakom pada reuiu Renstra tahun 2022. Meskipun demikian Pusakom sudah melakukan perhitungan capaian indikator ini dari tahun 2020, namun penetapan target secara eksplisit pada dokumen perencanaan baru dilakukan pada tahun 2023-2024. Berikut perbandingan realisasi indikator ini dari tahun 2020-2024.

Tabel 3. Perbandingan Capaian IK 1.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	0	3,30	-	-
Tahun 2021	0	3,60	-	-
Tahun 2022	0	3,62	-	-
Tahun 2023	3,63	3,65	100,55	Sangat Baik
Tahun 2024	3,66	3,62	98,88	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini selalu meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 0,3 poin, kemudian secara konsisten naik antara 0,02-0,03 poin dari tahun 2021-2023. Dari sisi capaian, belum dapat dilakukan analisis data lebih lanjut karena tidak ada penetapan target secara definitif untuk indikator ini pada tahun 2020-2022, sehingga capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2020-2022 belum dapat disimpulkan. Upaya yang perlu dilakukan untuk perencanaan selanjutnya dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator ini antara lain:

- a. Peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan standar layanan Pusakom.
- b. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan analisis kebijakan maupun dukungan strategis pimpinan.
- c. Meningkatkan infrastruktur yang menunjang pelaksanaan pelayanan *stakeholder* di Pusakom.

B. Sasaran Kegiatan 2 (Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan)

1. Indikator Kinerja 2.1 (Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan)

Indikator kinerja ini telah digunakan Pusakom sebagai parameter pengukuran kinerja sejak awal periode Renstra pada tahun 2020. Berikut perbandingan capaian indikator ini dari tahun 2020-2024.

Tabel 4. Perbandingan Capaian IK 2.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	100	100	100	Baik
Tahun 2021	100	100	100	Baik
Tahun 2022	100	100	100	Baik
Tahun 2023	100	100	100	Baik
Tahun 2024	100	100	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas secara berturut-turut dari tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak terdapat perubahan atas pencapaian indikator ini. Pusakom secara konsisten terus mencatatkan angka sempurna untuk dapat melaksanakan kegiatan analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan. Upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian indikator ini adalah:

- a. Peningkatan koordinasi dalam menjaring kebutuhan analisis kebijakan dari *stakeholder* Pusakom yaitu unit ke deputian, dan unit kerja lain di lingkungan BPOM salah satunya melalui forum konsultasi rencana analisis kebijakan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Mengikuti isu eksternal terkini terkait pengawasan dan keamanan obat dan makanan di Indonesia maupun di mancanegara.

C. Sasaran Kegiatan 3 (Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan)

1. Indikator Kinerja 3.1 (Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan)

Pengukuran capaian kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan telah diukur dari tahun 2020 dan diukur secara triwulanan. Pada analisis laporan kinerja tahunan ini akan disajikan perbandingan realisasi tahunan untuk indikator ini sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Capaian IK 3.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	80	91,05	113,81	Sangat Baik
Tahun 2021	84	91,75	109,23	Sangat Baik
Tahun 2022	94	94,38	100,40	Sangat Baik
Tahun 2023	96	97,20	101,25	Sangat Baik
Tahun 2024	98	98,19	100,20	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas apabila ditinjau dari realisasi indikatornya maka dapat terlihat tren kenaikan dari tahun 2020-2023. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2022 dan 2023. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman seluruh tim pelaksana kegiatan analisis kebijakan terhadap pedoman analisis kebijakan telah meningkat, sehingga implementasi pedoman dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila ditinjau dari sisi capaian kinerja, terdapat penurunan capaian dari tahun 2020-2022. Hal ini dapat terjadi karena terdapat penyesuaian target kinerja pada tahun 2021 karena adanya perubahan SOTK BPOM. Peningkatan target yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi yang sebanding dengan peningkatan targetnya. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2020 memang sudah langsung memperoleh nilai yang tinggi sehingga capaian tahun 2020 dan tahun 2021 nya sangat jauh melebihi target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Sehingga saat dilakukan penyesuaian target dengan proyeksi realisasi indikator pada tahun

sebelumnya, *gap* realisasi dan target tahun 2022-2023 cenderung mengecil dan capaian indikatornya cenderung menurun. Upaya yang perlu dilakukan Pusakom untuk meningkatkan pencapaian indikator ini pada perencanaan tahun mendatang antara lain:

- a. Melibatkan pakar ahli dalam pelaksanaan analisis kebijakan Obat dan Makanan;
- b. Mengimplementasikan berbagai aturan yang telah tertuang dalam Pedoman Penyusunan Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tahapan kegiatan analisis kebijakan.

D. Sasaran Kegiatan 4 (Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal)

- 1. Indikator Kinerja 4.1 (Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan)
Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020-2022. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan cara pengukuran dan parameter ukur yang digunakan pada tahun 2023 dengan parameter ukur yang digunakan tahun 2020-2022. Apabila disandingkan, berikut perolehan capaian indikator ini dari tahun 2020-2024.

Tabel 6. Perbandingan Capaian IK 4.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	70	75,93	108,47	Sangat Baik
Tahun 2021	75	70,37	93,83	Cukup
Tahun 2022	80	80	100,00	Baik
Tahun 2023	77	78,03	101,34	Sangat Baik
Tahun 2024	78,8	84,85	107,68	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat terlihat terdapat anomali penurunan target pada tahun 2023. Hal ini merupakan dampak dari perbaikan parameter ukuran kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan. Sebelumnya kualitas diseminasi hanya diukur berdasarkan luar cakupan publikasinya saja, namun setelah cakupan publikasi dan jenis diseminasi yang dilakukan direformulasi, kualitas diseminasi dinilai lebih baik dengan parameter luas berdasarkan bobotnya masing-masing. Dari sisi capaian kinerja juga terdapat fluktuasi perolehan capaian yang menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021 kemudian baru mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Perubahan target pada tahun 2023 ini diikuti juga dengan penyesuaian target di tahun 2024. Upaya yang perlu dilaksanakan Pusakom dalam meningkatkan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.
- b. Secara aktif menyusun publikasi baik melalui seminar, presentasi, jurnal, poster dan bentuk publikasi lain yang memungkinkan.

E. Sasaran Kegiatan 5 (Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan)

- 1. Indikator Kinerja 5.1 (Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan

dukungan strategis Pimpinan)

Fungsi dukungan strategis pimpinan merupakan fungsi baru yang dimiliki Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2023. Sebelumnya fungsi ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Realisasi tahun 2023 ini masih dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya walaupun fungsinya dijalankan oleh unit yang berbeda. Berikut perbandingan realisasi indikator ini tahun 2020-2024.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IK 5.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	75	85,37	113,83	Sangat Baik
Tahun 2021	83,1	84,41	101,85	Sangat Baik
Tahun 2022	83,5	90,02	107,81	Sangat Baik
Tahun 2023	84	87,96	104,71	Sangat Baik
Tahun 2024	89	90,67	101,87	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan. Dari sisi capaian kinerja dari tahun 2020-2024 juga mengalami fluktuasi yang sama turun dan naik. Upaya yang perlu dilaksanakan Pusakom dalam meningkatkan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Intensifikasi pelaksanaan pendampingan kegiatan Kepala BPOM.
- b. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan Kepala BPOM sehingga seluruh arahan Kepala BPOM dapat diselesaikan sesuai *timeline*.
- c. Peningkatan kualitas bahan strategis yang disusun untuk berbagai agenda Kepala BPOM.

F. Sasaran Kegiatan 6 (Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal)

1. Indikator Kinerja 6.1 (Indeks Reformasi Birokrasi Pusakom)
- Indeks RB merupakan indikator yang telah dimiliki Pusakom sejak periode awal Renstra tahun 2020. Capaian indikator ini terus diukur dengan periode tahunan sehingga ketercapaiannya dapat dibandingkan dari tahun 2020-2024. Berikut perbandingan capaian indeks RB tahun 2020-2024.

Tabel 8. Perbandingan Capaian IK 6.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	81	77,92	96,20	Cukup
Tahun 2021	81,7	81,74	100,05	Sangat Baik
Tahun 2022	85,2	87,17	102,31	Sangat Baik
Tahun 2023	88,7	87,55	98,70	Cukup
Tahun 2024	92,2	86,29	93,59	Cukup

Berdasarkan perbandingan di atas, terdapat penurunan persentase capaian di tahun 2024. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun 2024 keterbatasan inovasi dalam pelayanan, ketidakseimbangan sumber daya manusia, dan belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana serta sistem digital. Upaya yang perlu dilakukan Pusakom untuk meningkatkan pencapaian indikator adalah sebagai berikut.

- a. Melengkapi mekanisme pembentukan tim pembangunan RB dengan kriteria pengukuran yang jelas.
- b. Mendokumentasikan kegiatan pembangunan RB setiap bulan.
- c. Melengkapi laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan RB dengan bukti tindak lanjut.
- d. Melakukan pengukuran dampak atas rencana aksi agen perubahan.
- e. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi. Inovasi diharapkan selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut.
- f. Melaporkan perubahan *subsite* resmi pada monitoring penggunaan teknologi informasi.
- g. Memfasilitasi saluran pelaporan pengaduan yang terhubung langsung ke Kepala Unit Kerja.
- h. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan dan menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil survei kepuasan pelanggan.
- i. Melakukan pengukuran kemudahan dari layanan publik yang diberikan dan menyesuaikan jumlah layanan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.
- j. Meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- k. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran.
- l. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun Zona Integritas sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

2. Indikator Kinerja 6.2 (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja nilai AKIP Pusakom tahun 2020-2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IK 6.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	80	75,06	93,81	Cukup
Tahun 2021	76,6	75,1	98,04	Cukup
Tahun 2022	78,1	80,475	103,04	Sangat Baik
Tahun 2023	79,6	80,61	101,27	Sangat Baik

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2024	82,76	81,58	98,57	Cukup

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun sebelumnya di atas secara capaian tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pencapaian nilai AKIP apabila dibandingkan dari tahun 2020 ke tahun 2024 secara realisasi terjadi peningkatan nilai sebesar 4,76 poin. Pada akhir periode Renstra Pusakom mendapatkan nilai yang tidak tercapai dengan target. Upaya yang perlu dilakukan Pusakom untuk meningkatkan pencapaian indikator yaitu sebagai berikut.

- a. Menyusun dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran periode sebelumnya dan memastikan keselarasan data perencanaan dalam setiap dokumen tersaji secara konsisten.
- b. Menyajikan data capaian kinerja pada laporan kinerja sesuai dengan kertas kerja perhitungan target secara konsisten pada berbagai bentuk laporan yang disusun.
- c. Menyusun laporan evaluasi dengan memperhatikan kaidah penyusunan sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM.
- d. Melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian kinerja pada forum evaluasi periodik yang dijadwalkan serta mendokumentasikan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang telah diidentifikasi.

G. Sasaran Kegiatan 7 (Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal)

1. Indikator Kinerja 7.1 (Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan)

Indeks profesionalitas ASN ini telah secara rutin diukur capaiannya dari tahun 2020-2024. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap tahun. Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator ini dari tahun 2020-2024.

Tabel 10. Perbandingan capaian IK 7.1 tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	75	86,57	115,43	Sangat Baik
Tahun 2021	86,5	87	100,58	Sangat Baik
Tahun 2022	86,7	86,59	99,87	Cukup
Tahun 2023	86,9	92,88	106,88	Sangat Baik
Tahun 2024	92,45	87,27	94,40	Cukup

Berdasarkan realisasi berikut dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan yang sangat signifikan terhadap nilai indeks profesionalitas ASN. Peningkatan tersebut disebabkan karena seluruh pegawai telah memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP), beberapa pegawai Pusakom telah menempuh

- pendidikan S2, dan sebagian besar pegawai Pusakom sudah memiliki jabatan fungsional yang spesifik. Upaya yang perlu dilakukan Pusakom untuk meningkatkan pencapaian indikator ini yaitu sebagai berikut.
- a. Melakukan identifikasi gap kompetensi masing-masing pegawai Pusakom sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
 - b. Melakukan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi untuk pegawai sesuai dengan gap kompetensi yang telah diidentifikasi.
 - c. Mendorong pegawai Pusakom secara selektif dan proporsional untuk dapat melaksanakan tugas belajar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

H. Sasaran Kegiatan 8 (Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan)

1. Indikator Kinerja 8.1 (Indeks pengelolaan data dan informasi Pusakom yang optimal)
- Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan telah dilakukan pengukuran secara rutin setiap triwulan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sehingga tren pencapaian indikator ini dapat dilihat dari tahun ke tahun. Berikut data capaian indikator ini dari tahun 2020-2024.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IK 8.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	1,51	0,75	49.67	Kurang
Tahun 2021	2	2,5	125,0	Sangat Baik
Tahun 2022	2,25	2,5	111,1	Sangat Baik
Tahun 2023	2,5	3	120	Sangat Baik
Tahun 2024	3	3	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas pencapaian, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Pusakom sempat gagal mencapai target indeks pengelolaan data dan informasi. Namun sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, Pusakom terus berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan realisasi indeks pengelolaan data dan informasi, hingga pada tahun 2024 realisasi indeksnya telah mencapai nilai maksimal yaitu 3 dengan capaian sangat baik 120%. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pusakom dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara rutin menggunakan *email corporate* mail.pom.go.id dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari.
- b. Melakukan monitoring penggunaan *email corporate* secara berkala.
- c. Melakukan pemutakhiran *dashboard* BPOM *Operational Center* setiap bulan sekali.

I. Sasaran Kegiatan 9 (Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel)

1. Indikator Kinerja 9.1 (Nilai Kinerja Anggaran)

Nilai kinerja anggaran merupakan indikator yang secara rutin diukur oleh Pusakom baik triwulanan maupun tahunan. Berikut perbandingan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2020-2024.

Tabel 12. Perbandingan capaian IK 9.1 tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahun 2020	93,0	90,6	97,42	Cukup
Tahun 2021	90,7	88,95	98,08	Cukup
Tahun 2022	91,3	88,19	96,59	Cukup
Tahun 2023	92,5	89,03	96,25	Cukup
Tahun 2024	89,65	97,97	109,28	Sangat Baik

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada 5 tahun pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024, Pusakom mencapai target kinerja yang ditetapkan pada akhir periode. Nilai kinerja anggaran Pusakom berkisar antara 88-90 sedangkan target kinerja yang ditetapkan antara 90-93. Dengan memperhatikan tren realisasi ini Pusakom melakukan review terhadap penetapan target kinerja tahunan terutama pada akhir periode Renstra tahun 2024 dengan memperhitungkan tren realisasi tahun 2020-2023. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pusakom dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator ini antara lain seperti di bawah ini.

- a. Melakukan Penyusunan perencanaan penggunaan anggaran secara periodik selama satu tahun dalam bentuk rencana penarikan dana (RPD) dan melakukan monitoring ketepatan pelaksanaan RPD.
- b. Melakukan Pengadministrasian dan Penggunaan Anggaran (revisi anggaran, pelaksanaan kontrak, penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP TUP sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.
- c. Melakukan pelaporan capaian output satker setiap bulan secara berkala.

I.1.2. Aspirasi Stakeholder

Pusakom telah banyak menjaring aspirasi stakeholder salah satunya melalui survei kepuasan pelanggan terutama untuk stakeholder Pusakom di lingkungan internal BPOM. Aspirasi yang dikumpulkan oleh Pusakom berupa masukan terkait kebutuhan topik analisis kebijakan dari stakeholder dan juga saran perbaikan kinerja pelaksanaan analisis kebijakan dalam mendukung pelaksanaan sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Aspirasi stakeholder berupa masukan topik analisis kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan akan menjadi pertimbangan bagi unit kerja untuk memutuskan rencana topik analisis kebijakan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Meskipun demikian tidak semua topik analisis kebijakan yang diusulkan oleh stakeholder akan menjadi topik analisis kebijakan yang dilaksanakan. Sebagian besar topik yang diusulkan dinilai kurang memiliki nilai strategis maupun sudah pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

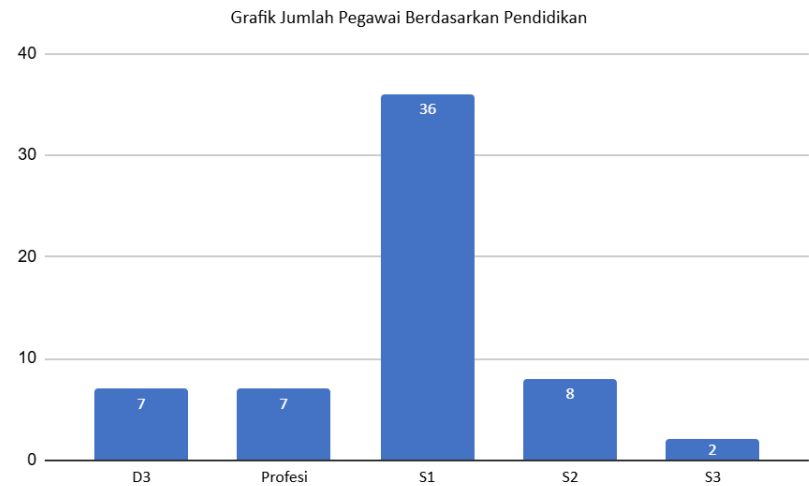
perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam pengembangan kebijakan, penelitian ilmiah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi teknologi pengawasan. Melalui kemitraan dengan kementerian terkait, BPOM dapat memastikan keselarasan kebijakan nasional di bidang kesehatan dan industri farmasi, sementara kerja sama dengan perguruan tinggi mendukung pengembangan riset berbasis evidensi serta peningkatan kompetensi tenaga pengawas. Sinergi ini menjadi fondasi penting bagi BPOM dalam mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Berikut adalah daftar instansi yang telah bekerja sama dengan BPOM.

Tabel 13. Daftar Instansi Kerja Sama dengan BPOM

No.	Instansi
1	Kementerian Kesehatan
2	Kementerian PPN/Bappenas
3	Kementerian Perdagangan
4	Badan Riset dan Inovasi Nasional
5	Kementerian Pertahanan
6	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
7	Kepolisian RI
8	Universitas Indonesia
9	Institut Teknologi Bandung
10	Institut Pertanian Bogor
	dst.

B. Pusakom memiliki SDM dengan beragam latar belakang pendidikan dan kesukuan

Beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Latar belakang pendidikan dan keberagaman suku menjadi aspek penting dalam membentuk dinamika sosial dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Perbedaan tingkat pendidikan mencerminkan variasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki individu, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.



Gambar 7. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Sementara itu, keragaman suku dan budaya mencerminkan kekayaan identitas bangsa, nilai-nilai lokal, serta tradisi yang berbeda-beda, yang jika

dikelola dengan baik dapat memperkuat inklusi, toleransi, dan kreativitas dalam masyarakat. Kombinasi latar belakang pendidikan yang beragam dengan pluralitas suku mendorong terciptanya interaksi sosial yang dinamis, memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan, dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

- C. Kegiatan analisis kebijakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dapat dilakukan secara fleksibel

Dengan dukungan teknologi digital, komunikasi daring, dan sistem manajemen proyek yang efektif, pekerjaan fleksibel tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keseimbangan kehidupan-kerja, tetapi juga membuka peluang bagi organisasi untuk mengakses talenta dari berbagai lokasi. Pendekatan ini mendorong budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan serta tuntutan global. Terdapat kebijakan BPOM yang memberikan fleksibilitas pegawai untuk melakukan pekerjaan secara WFH/WFA dan WFO.

- D. Akses data pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan mudah sebagai *input* kegiatan analisis kebijakan

Ketersediaan data yang mudah diakses menjadi faktor krusial dalam mendukung kegiatan analisis yang akurat dan tepat waktu. Akses yang cepat dan terbuka terhadap data memungkinkan para analis untuk melakukan evaluasi, identifikasi tren, dan perumusan rekomendasi berbasis bukti dengan lebih efektif. Selain itu, data yang mudah diperoleh juga meminimalkan hambatan teknis dan administratif, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan kebijakan atau strategi organisasi. Dengan demikian, kemudahan akses data tidak hanya meningkatkan kualitas analisis, tetapi juga memperkuat kapasitas lembaga atau individu dalam menghasilkan keputusan yang relevan, responsif, dan berdampak nyata. Pusakom menggunakan data yang diakses melalui Portal SATU DATA BPOM.

I.2.2. *Weakness* (Kelemahan)

- A. Kompleksitas topik analisis kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan memerlukan dukungan berbagai pakar dari berbagai keahlian

Analisis kebijakan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan proses yang sangat kompleks dan multidimensional. Kompleksitas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aspek kesehatan masyarakat, ekonomi, industri, serta dinamika regulasi. Setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya harus menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap pelaku usaha, inovasi teknologi, serta kesiapan sistem pengawasan nasional.

Keragaman isu yang muncul seperti perkembangan bioteknologi, digitalisasi sistem distribusi, keamanan rantai pasok, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pendekatan analisis yang holistik dan lintas disiplin. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan keterlibatan pakar dari berbagai bidang keilmuan, seperti farmasi, gizi, kimia, mikrobiologi, teknologi pangan, kesehatan masyarakat, hukum, ekonomi, serta kebijakan publik. Kolaborasi para ahli tersebut

memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, berbasis bukti, dan adaptif terhadap tantangan global.

Pendekatan multidisiplin ini menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam melindungi masyarakat, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia industri. Dengan demikian, penguatan sinergi antarbidang keahlian merupakan langkah strategis dalam memastikan kebijakan pengawasan yang berdaya saing, berintegritas, dan berkelanjutan.

B. Pusakom belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani beberapa isu

Isu strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan dapat diidentifikasi secara luas antara lain terkait pertumbuhan UMKM, *emerging issue* diantaranya perubahan iklim akan mempengaruhi jenis penyakit yang dihadapi maupun perkembangan preferensi konsumen terhadap Obat yang lebih ramah lingkungan. Emisi dan cemaran limbah yang dihasilkan oleh industri Obat dan Makanan menjadi salah satu sumber terjadinya perubahan iklim. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam proses analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan dalam mendorong industri untuk menekan emisi dan limbah serta mendukung terwujudnya “*sustainability industry*”. Untuk itu Pusakom perlu untuk mengarusutamakan isu perubahan iklim dan target-target pencapaian SDGs dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh BPOM, produksi dan konsumsi Obat dan Makanan yang berkelanjutan, perubahan iklim kaitannya dengan produksi dan konsumsi obat dan makanan, penguasaan teknologi yang semakin berkembang. Kelemahan Pusakom terkait tindak lanjut dari isu tersebut adalah masih kurangnya peningkatan kompetensi pegawai untuk dapat melaksanakan analisis kebijakan terkait dengan isu-isu tersebut diatas.

Selain itu dari sisi sumber daya anggaran, Pusakom juga mengalami efisiensi anggaran Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka anggaran Pusakom mengalami efisiensi senilai Rp7.906.298.000 dari total pagu anggaran sebesar Rp13.108.632.000. Hal ini berdampak pada penyesuaian ruang lingkup pelaksanaan analisis kebijakan. Contohnya pada kegiatan Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat yang pada tahun sebelumnya dapat menghasilkan indeks sampai tingkat Provinsi dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan KIE, pada tahun ini karena dampak efisiensi, kegiatan tersebut hanya dapat menghasilkan indeks skala nasional.

C. Akses data eksternal lintas kementerian yang sulit dalam menangani isu kebijakan lintas sektor

Dalam pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap data eksternal lintas kementerian dan lembaga. Isu ini muncul karena kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan bersifat lintas sektor, mencakup aspek kesehatan, perdagangan, industri, pertanian, hingga lingkungan. Setiap sektor memiliki sistem informasi dan basis data yang dikelola secara terpisah, dengan mekanisme pertukaran data yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Keterbatasan akses data tersebut berdampak pada proses analisis kebijakan, terutama dalam hal validitas, kelengkapan, dan sinkronisasi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, perbedaan standar data, mekanisme keamanan informasi, serta kebijakan kerahasiaan antarinstansi menjadi kendala dalam melakukan integrasi dan pemanfaatan data secara efektif.

Upaya penanganan isu kebijakan lintas sektor membutuhkan dukungan kolaboratif antarinstansi, baik melalui penguatan *data sharing agreement*, interoperabilitas sistem informasi, maupun forum koordinasi lintas kementerian/lembaga. Dengan demikian, peningkatan akses data eksternal secara terstruktur dan terstandar akan memperkuat kapasitas analisis kebijakan, mempercepat respons terhadap isu strategis, serta mendorong terwujudnya kebijakan pengawasan yang lebih sinergis, transparan, dan akuntabel.

- D. Proses pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan yang melibatkan pihak ketiga (Penyedia Jasa) sering tidak berjalan sesuai *timeline*
Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan dalam proses administrasi, perbedaan persepsi terhadap lingkup pekerjaan, serta kendala teknis di lapangan yang memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan.

Ketidaksesuaian jadwal tersebut berdampak pada pencapaian target output kegiatan dan efektivitas penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi dengan pihak ketiga, termasuk pemantauan progres secara berkala dan penerapan langkah korektif yang lebih cepat, agar pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- E. Keterbatasan pemenuhan sarana prasarana bagi pegawai Pusakom
Keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi salah satu hambatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai secara optimal. Beberapa fasilitas kerja, seperti perangkat teknologi informasi, ruang kerja, serta peralatan pendukung operasional, belum sepenuhnya memadai baik dari sisi jumlah maupun kelayakan. Masih terdapat pegawai yang belum mendapatkan laptop kerja, terdapat kerusakan laptop, dan komposisi ruang kerja yang sudah melebihi kapasitas. Kondisi ini berdampak pada efisiensi kerja, kecepatan layanan, serta kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan rutin maupun kegiatan strategis.

Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana secara bertahap, disertai perencanaan kebutuhan yang lebih terukur dan berbasis prioritas. Penguatan dukungan infrastruktur kerja akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pegawai, kualitas layanan publik, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

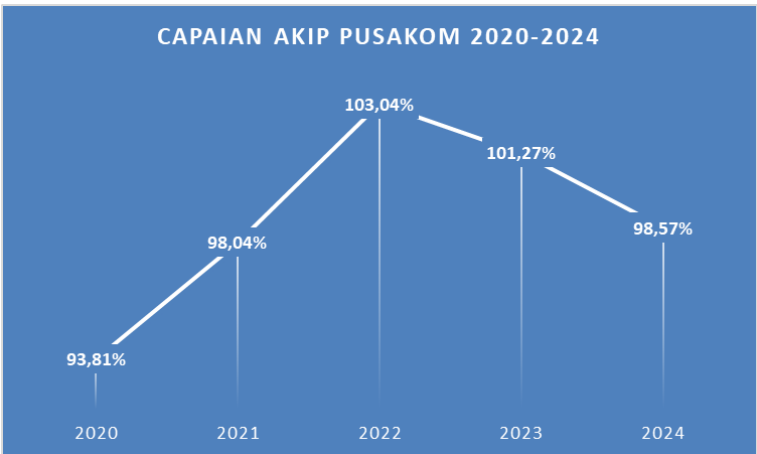
- F. Beberapa fungsi jabatan administrasi (Analisis Anggaran, Analisis BMN, Analisis Pengelolaan APBN dan Analisis SDM) belum terpenuhi

Kondisi ini menyebabkan beban kerja tidak merata, di mana sebagian pegawai harus merangkap tugas atau menangani tanggung jawab di luar bidang utamanya. Selain berdampak pada efisiensi kerja, kekosongan jabatan juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi antar bagian.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan percepatan proses pengisian jabatan melalui mekanisme mutasi, promosi, atau rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku. Penempatan pegawai yang tepat pada posisi strategis akan memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi administrasi dan implementasi kebijakan secara efektif dan berkesinambungan.

G. Pusakom belum sepenuhnya melaksanakan akuntabilitas (nilai SAKIP 81,58)

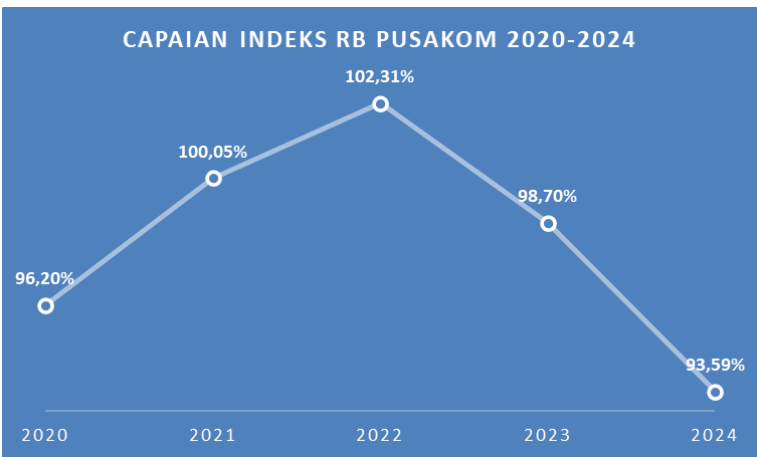
Berdasarkan perbandingan capaian tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pencapaian nilai AKIP apabila dibandingkan dari tahun 2020 ke tahun 2024 secara realisasi terjadi peningkatan nilai sebesar 4,76 poin. Pada akhir periode Renstra Pusakom 2020-2024 mendapatkan nilai yang tidak tercapai yaitu 81,58 dari target 82,76. Diperlukan upaya perbaikan Pusakom untuk meningkatkan pencapaian indikator ini.



Gambar 8. Grafik Capaian AKIP Pusakom Tahun 2020-2024

H. Pusakom belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pusakom menunjukkan tren penurunan selama dua tahun terakhir.



Gambar 9. Grafik Capaian Indeks RB Pusakom Tahun 2020-2024

Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip reformasi, termasuk aspek birokrasi yang efektif, pelayanan publik yang responsif, serta akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Penurunan indeks ini dapat berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, motivasi pegawai, serta kecepatan pencapaian target strategis organisasi.

Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan inovasi dalam pelayanan, ketidakseimbangan sumber daya manusia, dan belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana serta sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan internal yang lebih konsisten. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki nilai indeks, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

I. Banyaknya dokumen arsip ketatausahaan yang perlu disusun dalam rangka penyerapan anggaran

Pelaksanaan kegiatan terkait penyerapan anggaran memerlukan penyusunan dan pengelolaan dokumen arsip ketatausahaan dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran, yang harus disusun secara sistematis, lengkap, dan akurat. Volume dokumen yang tinggi menuntut waktu, tenaga, dan koordinasi yang intensif, sehingga dapat menjadi tantangan dalam menjaga efektivitas administrasi dan kelancaran proses penyerapan anggaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diterapkan mekanisme pengelolaan arsip yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan sistem digitalisasi dokumen, standarisasi format, dan prosedur kerja yang jelas. Dengan pengelolaan arsip yang tertata, proses administrasi penyerapan anggaran dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan, sekaligus mendukung akuntabilitas dan pengawasan internal secara lebih optimal.

I.2.3. *Opportunity* (Peluang)

A. Adanya dukungan Pemerintah terhadap penerapan *regulatory science* (*evidence-based policy*) dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Dukungan ini mencakup penyediaan pedoman, fasilitasi kapasitas SDM, serta alokasi anggaran untuk pengembangan dan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based*). Dengan memanfaatkan ilmu dan keahlian multidisiplin mulai dari farmasi, teknologi pangan, mikrobiologi, hingga kesehatan masyarakat menjadikan regulasi yang diterapkan dapat lebih efektif, akurat, dan responsif terhadap dinamika industri serta kebutuhan perlindungan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam mendukung penerapan regulasi berbasis ilmu juga memperkuat koordinasi antarinstansi, mendorong inovasi pengawasan, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha. Upaya ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan mutu produk, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

- B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk metodologi dan *tools* analisis kebijakan yang mengikuti perkembangan industri dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas analisis kebijakan, terutama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem basis data, *big data*, dan metode analisis modern memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data secara lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Hal ini mendorong proses perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan responsif terhadap perubahan dinamika industri maupun kebutuhan masyarakat.

Selain itu, integrasi pengetahuan multidisiplin dengan inovasi teknologi memfasilitasi identifikasi risiko, evaluasi efektivitas regulasi, serta pemantauan implementasi kebijakan secara *real-time*. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis, meningkatkan kualitas kebijakan, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

- C. Peningkatan kebutuhan jumlah analisis kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kebutuhan yang signifikan terhadap hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis kebijakan yang komprehensif memungkinkan identifikasi hambatan regulasi, optimalisasi mekanisme pengawasan, serta penyusunan pedoman yang mendorong UMKM untuk memproduksi produk yang aman, bermutu, dan kompetitif di pasar.

Peningkatan kebutuhan ini juga menuntut pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*), kolaborasi lintas disiplin, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyajikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, hasil analisis kebijakan yang akurat dan strategis tidak hanya mendukung kepatuhan UMKM terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, inovasi produk, dan penciptaan lapangan kerja.

- D. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia diikuti dengan meningkatnya penggunaan TIK masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan ini adalah pemanfaatan teknologi digital, baik dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun informasi publik. Digitalisasi memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas, efisiensi pelayanan, dan penguatan kapasitas individu serta komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.



Gambar 10. Infografik IPM 2024

Pemanfaatan teknologi digital juga memberikan dukungan signifikan dalam pengambilan keputusan berbasis data, penyediaan layanan publik yang lebih responsif, serta inovasi di sektor ekonomi, termasuk UMKM. Dengan demikian, kemajuan IPM tidak hanya mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang meningkat, tetapi juga pentingnya integrasi teknologi digital sebagai pendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

- E. Meningkatnya kepedulian *stakeholder* (pemerintah, pimpinan, masyarakat) terhadap isu kemandirian bahan baku dan produksi farmasi dan pangan olahan yang berkelanjutan

Peningkatan kesadaran ini muncul seiring dengan pentingnya memastikan ketersediaan produk strategis, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjaga kualitas dan keamanan produk bagi konsumen. Kepedulian *stakeholder* mendorong upaya kolaboratif dalam pengembangan sumber daya lokal, inovasi teknologi produksi, serta penerapan praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dukungan ini juga memperkuat fondasi kebijakan yang berbasis ilmu dan data (*evidence-based*), sehingga produksi farmasi dan pangan olahan tidak hanya mandiri dan berkelanjutan, tetapi juga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan kesehatan masyarakat.

- F. Potensi perubahan struktur organisasi dan tata kelola Pusakom menjadi bagian dalam sebuah ke deputian dapat memperkuat posisi dan memperjelas tugas pokok dan fungsi Pusakom

Restrukturisasi dilakukan untuk menciptakan alur koordinasi yang lebih efektif, pembagian tugas yang jelas, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan adaptif terhadap perubahan. Selain memperbaiki tata kelola, organisasi juga menyesuaikan budaya kerja dan pola komunikasi agar selaras dengan visi dan tujuan jangka panjang. Dengan demikian, perubahan struktur organisasi menjadi bagian dari proses transformasi

menuju organisasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.

- G. Penerapan peraturan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2024 tentang Implementasi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Penerapan peraturan menteri keuangan ini akan berdampak pada perubahan pengelolaan perjalanan dinas ke arah digitalisasi dokumen. Pelaksanaan perjalanan dinas kedepannya akan dikelola secara digital menggunakan E-Perjadin melalui pemanfaatan aplikasi *geo-tagging* untuk perekaman kehadiran pegawai dilokasi dinas sesuai dengan surat tugas. Dengan diterapkannya peraturan ini maka dokumen keuangan terutama pertanggungjawaban perjalanan dinas akan dikelola secara digital dan tidak menciptakan tambahan dokumen fisik berlebih seperti saat ini.

- H. Telah diselenggarakan rekrutmen PNS dan PPPK secara nasional Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) secara nasional membuka peluang strategis bagi Pusakom untuk memperkuat kapasitas SDM dan kualitas pelayanan internal. Dengan adanya perekrutan ini, Pusakom dapat menambah tenaga profesional yang kompeten, mendukung optimalisasi fungsi komunikasi, dokumentasi, dan koordinasi organisasi.



Gambar 11. Pengumuman *Recruitment* CASN BPOM 2024

Peluang ini juga memungkinkan Pusakom melakukan regenerasi SDM, menyelaraskan kompetensi pegawai dengan kebutuhan strategis organisasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan layanan publik. Dengan demikian, rekrutmen CASN tidak hanya menjadi sumber tenaga baru, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kinerja organisasi secara berkelanjutan.

- I. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan seluruh Kementerian Lembaga untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kebijakan Kementerian PAN-RB yang mewajibkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian dan lembaga negara menjadi peluang strategis bagi Pusakom untuk memperbaiki sistem manajemen dan pengukuran kinerja. Penerapan SAKIP mendorong standarisasi proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas

penyelenggaraan program dan kebijakan.

Dengan memanfaatkan peluang ini, organisasi dapat menyelaraskan tujuan strategis, memperkuat tata kelola internal, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

- J. Tuntutan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan melalui penerapan Reformasi Birokrasi yang baik

Tuntutan masyarakat dan *stakeholder* terhadap pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan semakin meningkat. Penerapan Reformasi Birokrasi yang baik menjadi kunci untuk menjawab tuntutan ini, melalui penguatan akuntabilitas, efisiensi proses kerja, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan reformasi birokrasi yang konsisten dan menyeluruh, organisasi dapat menciptakan tata kelola yang profesional, meminimalkan praktik yang tidak sesuai, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Upaya ini tidak hanya memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong budaya kerja yang inovatif, responsif, dan berfokus pada hasil, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.

- K. Ruang lingkup pekerjaan membuka kesempatan meningkatkan wawasan SDM dalam memahami program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Ruang lingkup pekerjaan yang luas dalam program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan membuka kesempatan bagi SDM untuk meningkatkan wawasan, kompetensi, dan pemahaman mendalam terkait kebijakan, prosedur, serta praktik pengawasan yang berlaku. Melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pengawasan, analisis kebijakan, dan koordinasi lintas sektor, pegawai dapat mengembangkan kemampuan teknis, analitis, dan manajerial secara lebih menyeluruh.

Kesempatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman individu, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi secara keseluruhan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta peningkatan mutu produk farmasi dan pangan olahan.

- L. Tuntutan *stakeholder* semakin tinggi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya dan tepat waktu

Tuntutan terhadap kualitas rekomendasi kebijakan semakin tinggi. *Stakeholder* mengharapkan rekomendasi yang andal, terpercaya, dan disampaikan tepat waktu agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel. Kondisi ini menuntut penguatan kapasitas analisis, pemanfaatan data dan bukti ilmiah yang komprehensif, serta koordinasi yang baik antar unit terkait. Dengan demikian, penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, tetapi juga mendukung implementasi kebijakan yang lebih responsif dan berdampak nyata.

I.2.4. *Threat* (Tantangan)

A. Dinamika organisasi BPOM berpengaruh terhadap tugas, fungsi dan proses bisnis yang dilakukan Pusakom

Kondisi ini dapat menambah beban kerja seperti kebijakan penunjukan Pusakom sebagai Pembina JFAK dan JF Statistisi. Dinamika organisasi yang terus berkembang, baik berupa perubahan struktur, penyesuaian proses kerja, maupun implementasi program baru, seringkali berdampak pada penambahan beban kerja. Perubahan ini menuntut adaptasi cepat, multitugas, serta kemampuan untuk mengelola prioritas yang semakin kompleks. Kondisi tersebut, jika tidak diimbangi dengan penyesuaian sumber daya dan mekanisme kerja yang efektif, dapat mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi manajemen beban kerja yang sistematis, termasuk redistribusi tugas, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Upaya ini penting untuk memastikan dinamika organisasi dapat direspons secara optimal tanpa mengurangi kualitas kinerja dan pelayanan publik.

B. Masyarakat Indonesia yang beragam memiliki tingkat literasi yang masih rendah diikuti dengan penyebaran informasi hoaks yang masif

Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses digital, penyebaran hoaks mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hoaks-hoaks ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan jam, sebuah informasi palsu bisa viral di berbagai platform media sosial. Hal ini menyebabkan publik lebih dahulu terpapar dan mempercayai informasi yang salah sebelum sempat mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Kurangnya literasi kesehatan dan literasi digital juga membuat masyarakat semakin rentan terhadap hoaks. Banyak orang belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi, membedakan sumber kredibel, atau memahami isi berita secara kritis.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi dan mengklarifikasi 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. BPOM juga telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan baik luring maupun daring dan telah menjaring ratusan ribu tautan penjualan dan iklan produk ilegal maupun yang mengklaim secara berlebihan.

Dengan kompleksitas ancaman ini, penyebaran hoaks tentang sediaan farmasi dan pangan olahan bukan sekadar persoalan informasi salah, melainkan tantangan sistemik yang mengancam kepercayaan publik terhadap sains, kebijakan kesehatan, hingga institusi. Pusakom ikut tanggung jawab terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memiliki tugas salah satunya melakukan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam mengakses, memilih, dan menyebarkan informasi sediaan farmasi dan pangan olahan agar terhindar dari hoaks.

C. Ancaman serangan siber terhadap sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom

Sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom menghadapi risiko ancaman siber yang semakin kompleks, mulai dari upaya peretasan, pencurian data, hingga gangguan operasional. Ancaman ini dapat berdampak pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Tingkat risiko meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas, baik untuk administrasi internal, analisis kebijakan, maupun layanan publik.

Untuk mengurangi dampak ancaman siber, diperlukan langkah-langkah preventif seperti penguatan keamanan jaringan, penggunaan sistem autentikasi yang aman, pelatihan literasi digital bagi pegawai, serta pemantauan dan respons insiden secara proaktif. Upaya ini penting untuk menjaga keandalan sistem informasi, mendukung kontinuitas operasional, serta memastikan keamanan data dan informasi strategis yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

- D. Berlakukannya peraturan penghapusan Tenaga PPNP di seluruh Kementerian/Lembaga paling lambat harus diterapkan di akhir tahun 2024. Kebijakan penghapusan tenaga PPNP akan berlaku efektif hingga akhir tahun 2024, dan mulai tahun berikutnya tidak akan ada lagi perekrutan pegawai melalui mekanisme PPNP. Kebijakan ini tertuang pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 66. Kebijakan ini bertujuan untuk menata kembali struktur kepegawaian, memperkuat stabilitas sumber daya manusia, serta menyesuaikan dengan regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintahan yang berlaku.

Dengan berakhirnya perekrutan Tenaga PPNP, organisasi akan fokus pada penguatan pegawai tetap melalui pengembangan kapasitas, redistribusi tugas, dan peningkatan efisiensi kerja. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan struktur kepegawaian yang lebih berkelanjutan, terencana, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif.

- E. Perubahan gaya kepemimpinan mempengaruhi kebijakan BPOM
- Tipe kepemimpinan yang berbeda-beda di tingkat pimpinan dapat menjadi tantangan dalam konsistensi perumusan dan implementasi kebijakan di BPOM. Perbedaan prioritas, pendekatan pengambilan keputusan, atau preferensi individu pimpinan berpotensi mempengaruhi arah kebijakan, kecepatan pengambilan keputusan, serta kesinambungan program strategis. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai, menghambat koordinasi internal, dan mempengaruhi efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Untuk mengantisipasi risiko ini, diperlukan mekanisme tata kelola yang jelas, pedoman operasional yang konsisten, serta sistem koordinasi dan komunikasi yang kuat. Dengan demikian, meskipun gaya kepemimpinan dapat berbeda, arah kebijakan tetap terjaga konsistensinya dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif.

- F. Jadwal agenda kegiatan pimpinan sangat dinamis
- Agenda pimpinan yang bersifat tidak terduga atau berubah secara mendadak menjadi tantangan bagi organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional maupun strategis. Ketidakpastian ini menuntut

pegawai untuk melakukan penyesuaian cepat, merubah prioritas kerja, serta mengalokasikan sumber daya secara fleksibel. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan kerja, mengganggu efektivitas koordinasi internal, dan mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Untuk menghadapi tantangan ini, perlu membangun mekanisme perencanaan yang adaptif, sistem komunikasi yang responsif, serta fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya. Langkah ini penting agar agenda pimpinan yang dinamis dapat direspons secara optimal tanpa mengurangi kualitas kinerja.

Tabel 14. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths 1. Pusakom memiliki networking yang baik dengan perguruan tinggi dan K/L terkait 2. Pusakom memiliki SDM dengan beragam latar belakang pendidikan dan kesukuan. Adaptif terhadap perkembangan teknologi dan didukung sarana dan prasarana yang memadai 3. Kegiatan analisis kebijakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dapat dilakukan secara fleksibel 4. Akses data pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan mudah sebagai input kegiatan analisis kebijakan.	Weaknesses 1. Kompleksitas topik analisis kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan memerlukan dukungan berbagai pakar dari berbagai keahlian 2. Pusakom belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani isu pertumbuhan UMKM, <i>emerging issue</i>, produksi dan konsumsi obat dan makanan yang berkelanjutan, perubahan iklim kaitannya dengan produksi dan konsumsi obat dan makanan, penguasaan teknologi yang semakin berkembang 3. Akses data eksternal lintas kementerian yang sulit dalam menangani isu kebijakan lintas sektor 4. Proses pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan yang melibatkan pihak ketiga (Penyedia Jasa) sering tidak berjalan sesuai <i>timeline</i> 5. Keterbatasan pemenuhan sarana prasarana bagi pegawai Pusakom 6. Beberapa fungsi jabatan administrasi (Analisis Anggaran, Analisis BMN, Analisis Pengelolaan APBN dan Analisis SDM) belum terpenuhi 7. Pusakom belum sepenuhnya melaksanakan akuntabilitas (nilai SAKIP 81,58) 8. Pusakom belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi 9. Banyaknya dokumen arsip ketatausahaan yang perlu disusun dalam rangka penyerapan anggaran
Opportunities 1. Adanya dukungan Pemerintah terhadap penerapan <i>regulatory science (evidence-based policy)</i> dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk metodologi dan tools	Threats 1. Dinamika organisasi BPOM berpengaruh terhadap tugas, fungsi dan proses bisnis yang dilakukan Pusakom 2. Masyarakat Indonesia yang beragam memiliki tingkat literasi yang masih rendah diikuti dengan penyebaran informasi hoaks

analisis kebijakan yang mengikuti perkembangan industri dan dan teknologi 3. Peningkatan kebutuhan jumlah analisis kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM 4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia diikuti dengan meningkatnya penggunaan TIK masyarakat 5. Meningkatnya kepedulian <i>stakeholder</i> (pemerintah, pimpinan, masyarakat) terhadap isu kemandirian bahan baku dan produksi farmasi dan pangan olahan yang berkelanjutan 6. Potensi perubahan struktur organisasi dan tata kelola Pusakom menjadi bagian dalam sebuah ke deputian dapat memperkuat posisi dan memperjelas tugas pokok dan fungsi Pusakom 7. Penerapan peraturan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2024 tentang Implementasi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8. Telah diselenggarakan rekrutmen PNS dan PPPK secara nasional 9. Kementerian PAN dan RB mewajibkan seluruh Kementerian Lembaga untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Tuntutan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan melalui penerapan Reformasi Birokrasi yang baik 11. Ruang lingkup pekerjaan membuka kesempatan meningkatkan wawasan SDM dalam memahami program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 12. Tuntutan <i>stakeholder</i> semakin tinggi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya dan tepat waktu	yang masif 3. Ancaman serangan siber terhadap sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom 4. Berlakukannya peraturan penghapusan Tenaga PPNP di seluruh Kementerian dan Lembaga paling lambat harus diterapkan di akhir tahun 2024 5. Perubahan gaya kepemimpinan mempengaruhi kebijakan BPOM 6. Jadwal agenda kegiatan pimpinan sangat dinamis
--	---

BAB II VISI, MISI, TUJUAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPOM secara optimal, maka Pusakom berkomitmen menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

II.1. Visi BPOM 2025-2029

Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Analisis Kebijakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.**

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman. Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu. BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing. BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera. Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka

peningkatan daya saing.

II.2. Misi BPOM

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Namun demikian BPOM juga mendukung Asta Cita lainnya yaitu pada poin 2, 3, 5, 6, dan 8. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan misi BPOM tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peranaktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk

pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan Misi BPOM, utamanya misi nomor 1 dan 4. Dukungan pada misi 1 diwujudkan melalui peningkatan kualitas kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diintervensi melalui analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dihasilkan oleh Pusakom.

Dukungan pada misi 4 diwujudkan melalui implementasi nilai reformasi birokrasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen mutu, manajemen risiko, dan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel. Dalam menjalankan visi tersebut Pusakom menerapkan budaya ASN BerAKHLAK dan budaya kerja PIKKIR yang dimaknai sebagai berikut:

1. Profesional, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas, dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional.
4. Kerja Sama Tim, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap, antisipatif dan responsif dalam mengatasi

masalah.

II.3. Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menangani secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM utamanya pada tujuan 1 yaitu dengan mendukung kinerja pengawasan dalam rangka memastikan keamanan dan mutu kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusakom senantiasa mendukung kinerja pengawasan dan mewujudkan kualitas kebijakan di bidang sediaan farmasi dan

pangan olahan yang berkualitas dan tujuan 5 dengan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, bukan lagi merupakan kewajiban namun telah menjadi kebutuhan utama untuk sebuah organisasi. Dengan menjalankan pekerjaan dengan pengelolaan yang baik akan meningkatkan kinerja dan pada akhirnya mendorong pelayanan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya tujuan BPOM tersebut diukur pencapaiannya menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 15. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

II.4. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan BPOM Tahun 2025-2029, dirumuskan sasaran kegiatan disertai indikator kinerja yang akan menjadi ukuran pencapaian kinerja Pusakom untuk 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan *cascading* sasaran kegiatan menggunakan *Logical Framework Approach* (LFA). Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Sasaran Kegiatan yang telah disusun Pusakom tersebut akan menjadi sasaran kegiatan pada struktur *cascading* Renstra BPOM Tahun 2025-2029. Sasaran dan indikator kegiatan ini merupakan *cascading* dari sasaran strategis BPOM “Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” pada indikator kinerja program “Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” dan sasaran strategis “Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima” pada indikator “Indeks RB BPOM”. Berikut penjabaran masing masing sasaran kegiatan Pusakom:

- A. Tersedianya Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas.
- Sasaran kegiatan Pusakom berisi rincian *output* yang harus dihasilkan guna mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Rincian *output* Pusakom yang menjadi turunan sasaran kegiatan ini adalah “Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan”. Dengan sasaran kegiatan ini, Pusakom akan memberikan kontribusi hasil analisis kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada inti proses bisnis BPOM. Pencapaian sasaran kegiatan ini salah satunya akan diukur melalui indikator persentase kemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan, yang dinilai berdasarkan hasil survei kepada *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal BPOM melalui survei kemanfaatan hasil analisis kebijakan. Selain itu juga diukur keberhasilannya melalui survei kepada penerima layanan Pusakom terkait dukungan strategis pimpinan. Indikator keberhasilan sasaran ini antara lain:
1. Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan
 2. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan
- B. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal.
- Sasaran kegiatan ini berfokus pada kualitas tata kelola dan proses bisnis

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pengelolaan organisasi yang bersih dan akuntabel menjadi prioritas BPOM yang juga harus diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh satuan kerja. Ketercapaian sasaran kinerja ini diukur dengan beberapa aspek seperti penerapan aspek reformasi birokrasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, implementasi manajemen risiko dan pengelolaan anggaran serta keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Berbagai aspek inilah yang nantinya menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tata kelola pemerintah yang optimal. Berikut penjelasan dari masing-masing ukuran keberhasilan dari sasaran ini:

- 1. Nilai Pembangunan Zona Integritas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
- 2. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
- 3. Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
- 4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT dan telah mendukung pencapaian tujuan BPOM. Dukungan dari setiap sasaran kegiatan terhadap visi, misi dan tujuan BPOM dapat dipetakan dalam bagan berikut:

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Tabel 16. Penjabaran Tujuan menjadi Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Makanan yang Aman dan Bermutu.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Indikator 1: Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan Indikator 2: Tingkat Keberhasilan Koordinasi Layanan Dukungan Strategis Pimpinan
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal. Indikator 1: Nilai Pembangunan Zona Integritas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Indikator 2: Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan
			Obat dan Makanan Indikator 3: Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Indikator 4: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Dalam rangka penerapan konsep perencanaan kinerja berbasis risiko sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025. Penyusunan dokumen rencana strategis harus memuat identifikasi risiko atas seluruh sasaran kegiatan yang telah dirumuskan. Perumusan identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan Pusakom. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Pusakom untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Pusakom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Tersedianya analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Menurunnya pemanfaatan hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	1. Memastikan Validitas data Hasil Analisis Kebijakan 2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja pemanfaat dalam pelaksanaan analisis kebijakan	Tim Kerja Analisis Kebijakan
		Menurunnya kredibilitas bahan substansi pimpinan sehingga tidak digunakan oleh Kepala BPOM	1. Berkoordinasi terkait muatan kebutuhan bahan dengan Kepala BPOM 2. Menggunakan sumber data yang kredibel dalam penyusunan bahan pimpinan	Tim Kerja Dukungan Strategis Pimpinan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan	1. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi Pusakom.	Subbagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Farmasi dan Pangan Olahan		
		Tidak optimalnya pemberdayaan pegawai Pusakom sesuai dengan kelompok jabatannya	1. Penataan dan pengelolaan SDM Pusakom agar dapat berkinerja secara optimal 2. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi untuk masing masing jabatan berdasarkan standar dan gap kompetensinya	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- A. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis
- Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi.

Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

- B. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
- Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
- C. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
- BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta

mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

- D. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
- E. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
- F. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- G. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

- A. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- B. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerja sama lintas sektor.
- C. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- D. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- E. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
- F. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas

pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.

- G. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 18. Pemetaan Arah Kebijakan BPOM

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mendukung dan melaksanakan arah kebijakan BPOM 2025-2029 sebagai berikut:

- A. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis
- B. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan

- C. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Strategi pelaksanaan arah kebijakan telah mulai dirumuskan pada Bab II menggunakan pendekatan analisis SWOT. Berikut beberapa strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT yang telah dikelompokkan menjadi dua aspek besar yaitu strategi pelaksanaan analisis kebijakan dan strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintah:

A. Strategi Pelaksanaan Analisis Kebijakan

1. Mengembangkan Pusakom sebagai pusat inovasi *regulatory science* bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pusakom dapat memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap penerapan *regulatory science* untuk mengembangkan kapasitas analisis kebijakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan K/L terkait untuk mengembangkan metodologi dan tools analisis kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

2. Meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom

Pusakom dapat memanfaatkan kekuatannya dalam hal dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi pada sistem keamanan siber yang memadai atau dengan mempercayakan pengelolaan keamanan siber kepada pihak Pusdatin.

3. Meningkatkan strategi komunikasi melalui diseminasi dan publikasi informasi hasil analisis kebijakan yang sesuai dengan tingkat literasi masyarakat

Pusakom dapat memanfaatkan kekuatannya dalam hal SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada masyarakat

4. Membangun jejaring dan menjalin kerja sama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kualitas analisis kebijakan

Strategi ini merupakan upaya Pusakom yang akan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas, dampak, dan kemanfaatan analisis kebijakan. Pusakom membangun dan menguatkan jejaring dan kerjasama dengan pentahelix (K/L lain, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media) baik dalam proses pelaksanaan analisis kebijakan maupun dalam diseminasi dan advokasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pusakom, khususnya *expertise*, data, dan informasi diharapkan dapat teratasi melalui kerja sama dengan pihak-pihak kunci.

5. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja terkait analisis kebijakan dan layanan dukungan strategis pimpinan

Strategi ini akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik. Dalam

proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusakom untuk menghasilkan analisis kebijakan yang bermanfaat dan layanan dukungan strategi pimpinan tidak terlepas dari keterlibatan unit kerja di lingkungan BPOM. Sistem koordinasi yang lancar dan baik perlu didukung dengan teknologi informasi yang memadai dan adanya mekanisme koordinasi yang efektif.

B. Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

1. Menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai pedoman

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan Pusakom khususnya peningkatan kualitas tata kelola, peningkatan budaya organisasi dan *core values* ASN BerAKHLAK, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan Pusakom yang prima. Pusakom akan senantiasa melakukan *continuous improvement* dalam penerapan RB sehingga indeks RB Pusakom semakin meningkat sesuai target yang ditetapkan.

2. Mengembangkan skema spesialisasi SDM agar terbentuk SDM yang profesional

SDM yang kompeten dan profesional merupakan syarat utama untuk menghasilkan analisis kebijakan dan layanan dukungan strategis yang memenuhi standar kualitas dan ekspektasi organisasi. Jabatan fungsional yang mampu tugas-tugas di Pusakom perlu ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan teknis substansi pekerjaan yang diemban. Saat ini jabatan fungsional yang ada di Pusakom yang mampu tugas pelaksanaan analisis kebijakan dan dukungan strategis pimpinan adalah Analisis Kebijakan, Pengawas Farmasi dan Makanan, serta Statistisi. Dengan fungsi pengawasan, maka kedepannya perlu ada spesialisasi keahlian. Dengan demikian, pengembangan kompetensi SDM untuk menciptakan SDM yang ahli (*expert*) akan lebih fokus dan terarah serta mendukung penerapan kebijakan pola karir SDM di BPOM.

3. Menerapkan SAKIP, Manajemen Mutu, dan Manajemen Risiko sesuai Pedoman

Dalam sistem manajemen pelaksanaan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara konsisten perlu terus memperbaiki pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk memperbaiki hal tersebut Pusakom harus menerapkan pedoman SAKIP yang telah disusun baik ditingkat KL maupun di level BPOM. Melaksanakan tugas berpedoman pada SOP manajemen mutu dan mengidentifikasi indikasi risiko untuk memitigasi munculnya risiko dalam menjalankan tugas.

4. Meningkatkan kapasitas SDM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya, dan tepat waktu

Dalam rangka memenuhi tuntutan *stakeholder* terkait dengan kebutuhan analisis kebijakan yang membutuhkan berbagai bidang keilmuan dalam pelaksanaannya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat memanfaatkan kekuatan komposisi SDM yang memiliki latar belakang bidang keilmuan dan memiliki akses mudah terhadap data pengawasan. Pemanfaatan SDM ini dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas sesuai dengan bidang keilmuannya dengan program *in house training* sesuai kebutuhan.

5. Menerapkan standar sistem akuntansi pemerintah sesuai kaidah peraturan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, diperlukan transparansi pengelolaan anggaran dan pengadministrasian keuangan. Pelaksanaan sistem pengelolaan anggaran dan keuangan yang berpedoman pada peraturan menteri keuangan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh satuan kerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Tabel 19. Pemetaan Arah Kebijakan BPOM dan Strategi Pusakom 2025-2029

No	Arah Kebijakan BPOM	Strategi Pusakom
1	Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	1. Mengembangkan Pusakom sebagai pusat inovasi <i>regulatory science</i> bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2. Meningkatkan strategi komunikasi melalui diseminasi dan publikasi informasi hasil analisis kebijakan yang sesuai dengan tingkat literasi masyarakat 3. Membangun jejaring dan menjalin kerja sama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kualitas analisis kebijakan 4. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja terkait analisis kebijakan dan layanan dukungan strategis pimpinan
2	Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Mengembangkan skema spesialisasi SDM agar terbentuk SDM yang profesional 2. Meningkatkan kapasitas SDM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya, dan tepat waktu 3. Meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom
3	Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	1. Menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai pedoman 2. Menerapkan SAKIP, Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko sesuai pedoman 3. Menerapkan standar sistem akuntansi pemerintah sesuai kaidah peraturan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Pusakom juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Pusakom pada periode Renstra Pusakom 2025-2029 antara lain:

A. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan rekomendasi hasil analisis kebijakan berbasis data atau informasi ilmiah (*evidence based*) guna mendukung “Program Pengawasan Obat dan Makanan”. Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Analisis Kebijakan

Perencanaan kebutuhan analisis kebijakan dilakukan pada awal periode Renstra dengan mengidentifikasi topik analisis kebijakan secara global yang akan mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Identifikasi topik ini dilakukan dengan berbagai metode, baik secara *top-down* (arahan pimpinan/*top management*) maupun *bottom-up* (usulan dari para analis atau berdasarkan rekomendasi hasil analisis sebelumnya). Identifikasi kebutuhan juga dilakukan melalui penjarangan kebutuhan dari *stakeholders*, maupun melalui analisis internal terhadap isu pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terkini.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan analisis kebijakan ini diantaranya adalah penyebaran kuesioner kepada *stakeholders*, melakukan forum *desk* usulan kebutuhan analisis kebijakan yang melibatkan seluruh unit kerja Pusat di BPOM. Rencana kegiatan N+1 secara formal dibahas dalam Forum Konsultasi Rencana Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Forkon). Forkon dihadiri oleh para pimpinan Madya dan Pratama di lingkungan BPOM, serta para pakar dari akademisi dan praktisi di bidang yang sesuai dengan analisis kebijakan yang akan dilakukan.

2. Analisis Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Komponen ini berisi berbagai pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun 2025-2029. Secara garis besar, tahun 2025 hingga tahun 2029 akan dilaksanakan berbagai kegiatan analisis kebijakan, meliputi 8 kelompok besar tema yang pelaksanaannya mengikuti *Roadmap* sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 20. *Roadmap* Analisis Kebijakan tahun 2025-2029

No	Topik	Tahun Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Evaluasi Program Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	v	v	v	v	v
2	<i>Profiling</i> Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar	v	v	v	v	v
3	Evaluasi Kelembagaan/Organisasi	v	v	v	v	v
4	Analisis Dampak Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	v	v	v	v	v
5	Analisis Kebijakan Pengendalian <i>Antimicrobial Resistance</i>	v	v	v	v	v
6	Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	v	v	v	v	v
7	Kajian Risiko Keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	v	v	v	v	v

No	Topik	Tahun Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
8	Analisis Isu Strategis Terkini Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	v	v	v	v	v

3. Diseminasi Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan sediaan farmasi dan pangan olahan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga menyusun kegiatan publikasi dan diseminasi rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh Pusakom serta pendampingan kegiatan pimpinan sebagai upaya advokasi rekomendasi kebijakan kepada pimpinan. Dalam 5 tahun kedepan pelaksanaan diseminasi akan dilaksanakan setiap tahun untuk seluruh hasil analisis kebijakan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan. Target audiens diseminasi setiap tahunnya akan disesuaikan dengan topik analisis kebijakan yang dihasilkan. Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga akan meneruskan pengembangan subsite sistem informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. subsite ini merupakan portal *online* bagi *stakeholder* Pusakom untuk dapat mengakses hasil analisis kebijakan. Portal ini dapat diakses oleh pengunjung secara umum baik Internal BPOM, K/L lain maupun akademisi dan masyarakat umum.

4. Dukungan Strategis Pimpinan

Pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membawa citra institusi sehingga setiap kalimat yang disampaikan oleh pimpinan juga merepresentasikan pernyataan kebijakan BPOM. Penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan yang andal diperlukan untuk menunjang kinerja pimpinan dalam mengikuti suatu kegiatan, memberikan arahan, hingga membuat dan menetapkan kebijakan. Selain itu, dukungan strategis pimpinan dapat mengidentifikasi kebutuhan analisis kebijakan dari pimpinan sehingga mendorong peningkatan pemanfaatan hasil analisis kebijakan. Dukungan strategis pimpinan dapat terlaksana melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan
- b. Pendampingan Kegiatan Substansi Pimpinan
- c. Pemantauan Implementasi Kebijakan Strategis Pimpinan

Tabel 21. *Roadmap* Pelaksanaan Dukungan Strategis Pimpinan 2025-2029

Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan	√	√	√	√	√
Pendampingan Kegiatan Substansi Pimpinan	√	√	√	√	√
Pemantauan Implementasi Kebijakan Strategis Pimpinan	√	√	√	√	√

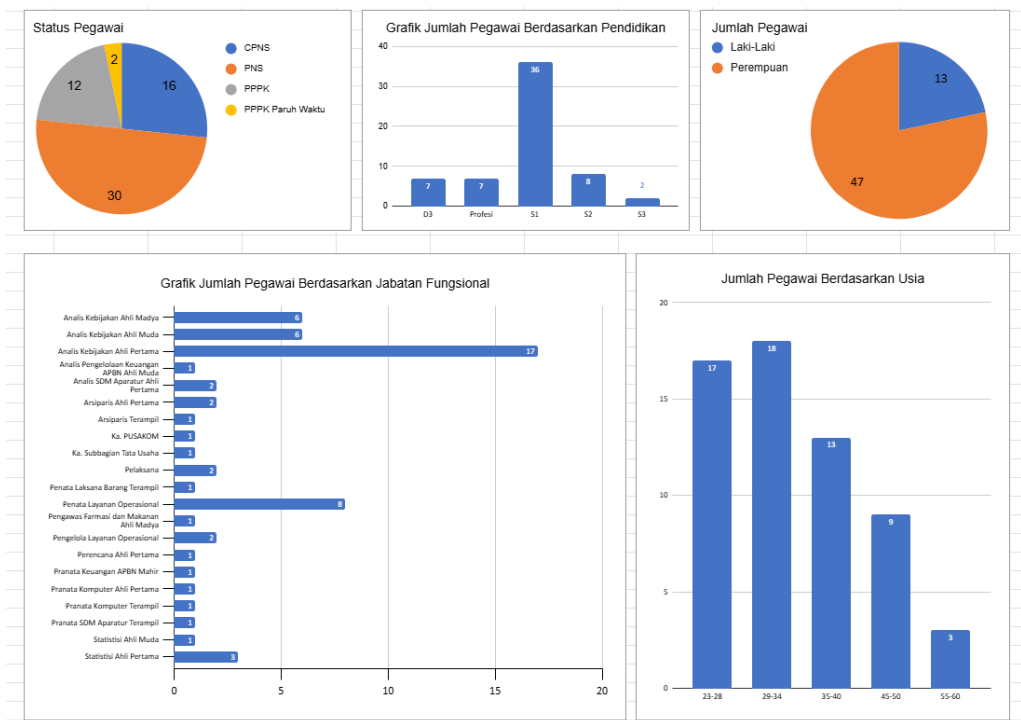
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan pengelolaan dukungan manajemen di Pusakom meliputi kegiatan pemeliharaan perkantoran, pemenuhan kebutuhan operasional pegawai,

pembayaran gaji dan honorarium pegawai hingga pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang milik negara. Berikut penjabaran sub kegiatan pengelolaan dukungan manajemen.

1. Layanan Perkantoran

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan mengelola anggaran gaji pegawai dan pemeliharaan secara mandiri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusakom diperkuat oleh sumber daya manusia sebanyak 60 orang, dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 9. Data Statistik Pegawai Pusakom Tahun 2025

Berdasarkan statistik di atas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan melekat pada masing-masing jabatan sesuai jenjang jabatan personil. Selain alokasi anggaran gaji dan tunjangan perlu melakukan pemeliharaan dan pemenuhan operasional perkantoran. Kondisi peralatan-peralatan kantor yang sudah ada juga memerlukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Untuk mobilitas dan operasional perkantoran, Pusakom memiliki kendaraan bermotor roda empat sebanyak dua unit dan kendaraan bermotor roda dua sebanyak satu unit. Agar kondisi kendaraan tersebut tetap dapat beroperasi dengan baik maka perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Selanjutnya untuk mendukung berjalannya tugas dan fungsi Pusakom dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis di bidang analisis data, maka diperlukan dukungan sarana telekomunikasi. Kegiatan layanan perkantoran bertujuan agar operasional perkantoran dapat terselenggara dengan baik. Adanya layanan perkantoran yang baik akan mendukung terpenuhinya tugas pokok dan fungsi Pusakom. Layanan perkantoran terdiri atas 2 tahapan kegiatan, yaitu:

a. Pembayaran Gaji

Sub komponen dalam komponen gaji dan tunjangan ini meliputi gaji pokok pegawai, tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan beras, uang makan, dan tunjangan lain yang menjadi hak pegawai negeri sipil.

- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- Dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran terdapat beberapa sub kegiatan yang dilakukan antara lain, pemeliharaan peralatan kantor seperti laptop dan PC, AC, printer dan mesin fotokopi serta aset lain yang dimiliki Pusakom. Selain itu terdapat juga Pengadaan perlengkapan kantor habis pakai seperti keperluan pokok dan ATK. Selain itu dianggarkan pula biaya pemeliharaan kendaraan kantor untuk satu unit motor dan dua unit mobil kemudian langganan telepon, anggaran honor pengelola kegiatan satuan kerja serta pemeriksaan kesehatan pegawai. Target kinerja pada rincian output ini adalah layanan yang secara generik telah ditetapkan oleh kementerian keuangan secara sistem.

Tabel 22. Target Rincian *Output* Layanan BMN

Rincian <i>Output</i>	Baseline (2024)	Tahun (layanan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	1

2. Layanan Barang Milik Negara
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan BMN tidak hanya pengadaan, namun siklus yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Barang milik negara harus dikelola dengan serius dan benar, dan dilaporkan secara rutin. Pelaporan BMN yang tepat waktu dan berkualitas akan mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan menuju tata kelola yang baik (*good governance*).

Pengelolaan Barang Milik Negara di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan bertujuan untuk melaksanakan penatausahaan BMN mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemindahan, dan penghapusan BMN secara akuntabel sesuai dengan ketentuan. Selain itu kegiatan dalam RO ini juga ditujukan untuk dapat menghasilkan Laporan Barang Milik Negara yang akuntabel secara periodik. Target kinerja pada rincian output ini adalah layanan yang secara generik telah ditetapkan oleh kementerian keuangan secara sistem.

Tabel 23. Target Rincian *Output* Layanan BMN

Rincian <i>Output</i>	Baseline (2024)	Tahun (Layanan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Layanan BMN	1	1	1	1	1	1

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Dalam menyusun perencanaan jangka menengah setelah disusun visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan uraian yang telah tertuang pada Bab II, kemudian kami menetapkan target yang relevan terhadap sasaran kinerja yang telah dirumuskan tersebut. Berbagai program dan kegiatan analisis kebijakan yang dicerminkan dari dua sasaran kegiatan dan enam indikator kinerja yang telah diuraikan pada Bab II. Berikut target kinerja untuk masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang dirumuskan untuk perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029.

Tabel 24. Target Indikator Kinerja Pusakom 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator	Baseline (2024)	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan	86,8	87	87,5	88,0	88,5	89,0
	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	90,67	91	91,3	91,6	91,9	92,2
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Pembangunan Zona Integritas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,29	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	81,58	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	2,96	3,01	3,10	3,15	3,20	3,25
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	5	5	5	5

IV.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian sasaran Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Kerangka Pendanaan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	8.928,54	11.145,22	13.972,56	14.604,20	15.744,25
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.828,44	7.144,99	7.501,95	7.876,85	8.270,58
TOTAL	12.210,98	18.290,21	21.474,51	22.481,05	24.014,83

Tabel 26. Kerangka Pendanaan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	12.210,98	18.290,21	21.474,51	22.481,05	24.014,83
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
TOTAL	12.210,98	18.290,21	21.474,51	22.481,05	24.014,83

Seluruh sumber pendanaan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 berasal dari Rupiah Murni (RM).

Matriks kinerja dan pendanaan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makan per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Pusakom 2025-2029 memuat analisis lingkungan strategis; visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan; arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan kerangka pendanaan Pusakom. Berbagai aspek strategis, baik internal maupun eksternal telah dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra ini guna memastikan relevansi dan efektivitas langkah-langkah yang akan diambil selama periode Renstra 2025-2029. Selain itu, Renstra ini disusun sejalan dengan Renstra BPOM 2025-2029 yang mengacu RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra ini akan berkontribusi terhadap pencapaian Renstra BPOM dan RPJMN 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan, staf, mitra kerja, dan masyarakat luas. Setiap pihak diharapkan dapat bersinergi dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dirancang, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Evaluasi dan monitoring menjadi komponen penting dalam memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, Pusakom setiap tahunnya akan melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Pusakom 2025-2029 dan apabila diperlukan akan melakukan perubahan atau revisi muatan Renstra, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan BPOM.

Demikian Renstra Pusakom 2025-2029 agar dapat menjadi acuan dan pedoman pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pencapaian kinerja Pusakom. Melalui pelaksanaan Renstra ini, diharapkan Pusakom dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal dalam mewujudkan tujuan strategis Pusakom, BPOM, dan RPJMN 2025-2029.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029

Tabel 30. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline Target Tahun	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro	PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan									8.928,54	11.145,22	13.972,56	14.604,20	15.744,25			
	SK.1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas												√		PUSAKOM
	IK 1.1	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	86,80	87	87,5	88	88,5	89								
	IK 1.2	Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	90,67	91	91,3	91,6	91,9	92,2								
	RO 1.1	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	5	6	6	7	7								

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Baseline Target Tahun	Target						Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal													PUSAKOM
	IK 2.1	Indeks Pembanguna n Zona Integritas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,29	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50							
	IK 2.2	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	81,58	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00							
	IK 2.3	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	2,96	3,01	3,10	3,15	3,20	3,25							
	IK 2.4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5	5	5	5	5	5							
	RO 2.1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan	-	5	6	7	7	7							

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline Target Tahun	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Makanan													
	RO 2.2	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	-	3	5	7	5	2							
	RO 2.3	Perangkat pengolah data dan komunikasi	-	2	19	9	15	13							
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									3.828,44	7.144,99	7.501,95	7.876,85	8.270,58		
	RO 2.4	Layanan BMN	-	1	1	1	1	1							
	RO 2.5	Layanan Perkantoran	-	1	1	1	1	1							

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN,

ttd

SYAMSIDAR THAMRIN